



# 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Isu penting pendidikan tinggi saat ini adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi dan privatisasi. Tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance* (GUG) diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 adalah persoalan tata kelola dan otonomi perguruan tinggi. Penerapan otonomi perguruan tinggi memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan publik (*stakeholders*). Menurut Darwais dan Mahyani (2009), otonomi perlu dilakukan secara efektif agar kebijakan publik mampu dilaksanakan secara efisien.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip GUG. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik, semakin besar kebutuhan akan transparansi keuangan sektor publik. Menurut Mahmudi (2011), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi untuk menciptakan kredibilitas dari suatu laporan keuangan. Lismawati (2011) menyatakan pengguna laporan keuangan yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik, tidak akan ragu untuk berbagi kepentingan penggunaannya jika hal tersebut telah terpenuhi. Salah satunya adalah penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Nordiawan (2008), laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki karakteristik: relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*).

Status kelembagaan Institut Pertanian Bogor (IPB) berdasarkan PP Nomor 154 tahun 2000 ditetapkan sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang merupakan awal era otonomi manajemen pendidikan tinggi di IPB sebagai landasan hukum dalam melakukan perubahan signifikan untuk mewujudkan *academic* dan *entrepreneurial excellence* (Chozin 2007). Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, menyatakan bahwa IPB tidak lagi menjadi perguruan tinggi BHMN. Sebagai kelanjutan dari amar keputusan tersebut, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 66 tahun 2010 bahwa pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU). Pada tahun 2012 terbit





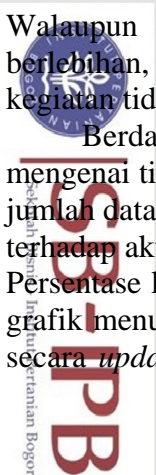
undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi yang mengatur tentang pendidikan tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. PP Nomor 66 tahun 2013, menyebutkan IPB merupakan PTN Badan Hukum yang wajib memenuhi peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan. IPB dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang Negara dan masyarakat. Selanjutnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 58 tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi badan hukum, sehingga pada saat ini IPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dengan perubahan terakhir merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pemerintah memberlakukan beberapa organisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk IPB, sebagai BLU ditujukan untuk mendorong PTN tersebut melakukan pembangunan sistem informasi akuntansi baru (Maharani *et al.* 2013). Status BLU diterapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja SDM keuangan. Menurut Waluyo (2011), fleksibilitas yang dimiliki BLU dalam pengelolannya yaitu pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang dan piutang, investasi, pengadaan barang dan jasa, dan akuntansi.

Untuk menganalisis kinerja keuangan suatu organisasi berdasarkan laporan keuangan, banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang berbeda-beda. Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan (Hery 2015). Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya, satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Perbandingan kinerja keuangan ini dapat digunakan untuk membandingkan pola keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya BLU.

Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2013 menyebutkan IPB memiliki kelemahan dalam desain dan operasi pengendalian intern yang akan berakibat negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dalam laporan keuangan. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya: (1) terbatasnya SDM keuangan, hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang berkompeten di bidang akuntansi yang terlibat dalam proses pembuatan laporan keuangan, dan (2) pemanfaatan teknologi informasi yang belum terintegrasi dalam suatu sistem yang mendukung proses pembuatan laporan keuangan. Kinerja SDM merupakan salah satu faktor yang perlu ditingkatkan untuk mensukseskan sebuah organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, pelaksanaan kegiatan tidak akan terselesaikan dengan baik (Yunus 2012).

Berdasarkan data sistem keuangan tahun 2013-2014, dapat diinformasikan mengenai tingkat ketepatan waktu pengadministrasian setiap transaksi di unit kerja, jumlah data transaksi yang diinput ke dalam sistem, dan hasil perhitungan (*scoring*) terhadap aktivitas setiap Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) di unit kerja IPB. Persentase keterlambatan tersebut disajikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2. Hasil grafik menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa unit kerja di IPB yang belum secara *update* melakukan input data transaksi keuangan ke dalam sistem aplikasi



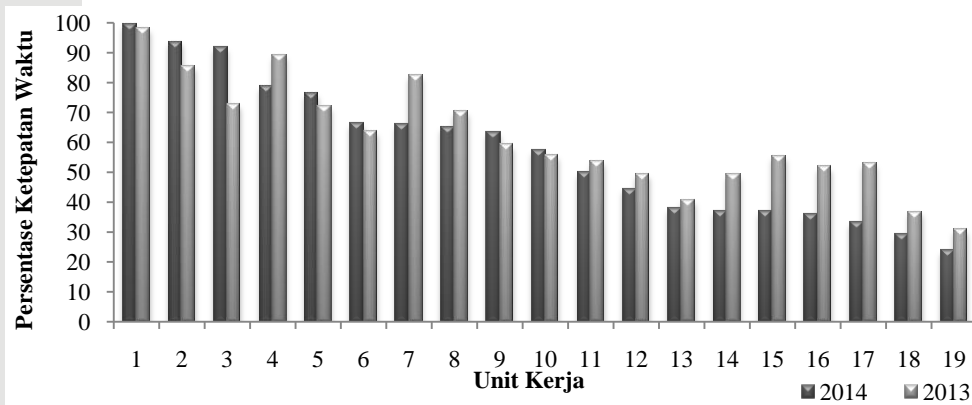
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

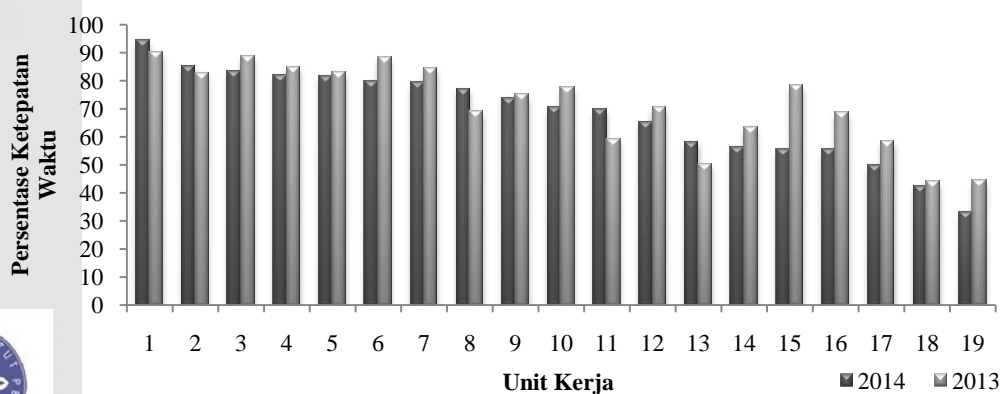
keuangan secara tepat waktu. Data yang disajikan pada gambar tersebut bersumber dari seluruh transaksi yang ada di sistem keuangan sesuai masing-masing unit kerja baik transaksi kas, bank, uang muka kerja, pajak, dan belanja.



Sumber: Simkeu IPB

Gambar 1 Grafik persentase ketepatan waktu beberapa Kantor Direktorat IPB

(Keterangan: 1. Direktorat Sumber Daya Manusia, 2. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 3. Direktorat Pengembangan Bisnis, 4. Direktorat Keuangan, 5. Kantor Hukum, Promosi, dan Humas, 6. Sekretariat Rektor, 7. Kantor Manajemen Mutu, 8. Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi, 9. Direktorat Sarana dan Prasarana, 10. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis, 11. Direktorat Kemahasiswaan, 12. Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik, 13. Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni, 14. Kantor Audit Internal, 15. Sekretariat Institut, 16. Direktorat Kerjasama dan Program Internasional, 17. Direktorat Administrasi Pendidikan, 18. Direktorat Riset dan Kajian Strategis, 19. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan)



Sumber: Simkeu IPB

Gambar 2 Grafik persentase ketepatan waktu beberapa Fakultas Departemen IPB

(Keterangan: 1. Departemen Statistika, 2. Mata Kuliah Dasar Umum, 3. Manajemen Bisnis, 4. Dekanat Fahutan, 5. Dekanat Sekolah Pascasarjana, 6. Departemen Matematika, 7. Dekanat FMIPA, 8. Departemen Geofisika dan Meteorologi, 9.



SB-IPB  
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor



Departemen Manajemen Hutan, 10. Departemen Biokimia, 11. Departemen Hasil Hutan, 12. Departemen Fisika, 13. Departemen Ilmu Komputer, 14. Diploma, 15. Departemen Silvikultur, 16. Departemen Kimia, 17. Tingkat Persiapan Bersama (TPB), 18. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata, 19. Departemen Biologi)

Persaingan global menempatkan kualitas sumberdaya manusia suatu Negara pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan posisi dan daya saing Negara tersebut dalam percaturan dunia (Muhi 2010). Permasalahan yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi, dan menganalisis sistem akuntansi yang ada (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006). Untuk melakukan aktivitas tersebut harus dilakukan oleh sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan berkualitas. Kinerja SDM merupakan salah satu faktor yang perlu ditingkatkan untuk mensukseskan sebuah organisasi. Organisasi harus mampu mengelola SDM dengan baik agar berdampak terhadap efektivitas kerja organisasi. Dengan melakukan pengelolaan sumberdaya manusia yang baik, maka akan menghasilkan *output* yang baik pula bagi perusahaan (Markos dan Sridevi 2010).

*Employee engagement* merupakan sebuah wacana yang berkembang saat ini dan merupakan kekuatan yang mengikat antara perusahaan dan karyawan baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual yang mampu mendorong karyawan melakukan kinerja optimal sehingga membuat perusahaan mampu mencapai tujuannya. Guntari *et al.* (2014) menyatakan *employee engagement* merupakan salah satu komponen penting dalam perusahaan dan merupakan aset yang sangat berharga. *Employee engagement* merupakan salah satu pengelolaan manajemen sumberdaya manusia. Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya *employee engagement* (Hanim *et al.* 2014).

Ketidaksiplinan SDM keuangan dalam menginput data menunjukkan bahwa *employee engagement* masih rendah. SDM dikatakan memiliki *engagement* yang tinggi apabila memiliki kinerja yang baik, mengeluarkan ide-ide terbaik, dan komitmen yang tulus dalam mencapai tujuan organisasi. Macey (2008) mendefinisikan *engagement* sebagai kesadaran dan kesediaan individu untuk memfokuskan energi, inisiatif, kemampuan adaptasi, serta menunjukkan usaha yang keras dan gigih untuk mencapai tujuan organisasi. Schaufeli dan Bakker (2003) mendefinisikan *employee engagement* sebagai keadaan motivasional positif yang mengandung karakteristik *vigor* (tingkat energi yang tinggi dan terdapat kemauan untuk menginvestasikan tenaga dan presistensi), *dedication* (keterlibatan kuat ditandai oleh antusiasme dan rasa bangga serta inspirasi), dan *absorption* (keadaan totalitas karyawan sehingga sulit memisahkan karyawan dari pekerjaannya). Oleh karena itu, SDM keuangan IPB perlu melakukan pengukuran *employee engagement* untuk meningkatkan produktivitas kinerja SDM (Rachmawati 2010).

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks harus diikuti dengan kemampuan pengelolaan keuangan sehingga diperlukan pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan perguruan tinggi dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Menurut Prastiwi (2014), teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta diindungi Undang-Undang

Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, akuntabilitas, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam membuat laporan keuangan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja staf keuangan. Laporan keuangan IPB masih disusun secara manual walaupun sudah ada Sistem Aplikasi Akuntansi yang selama ini telah dikembangkan oleh Biro Keuangan IPB, hal ini disebabkan belum terintegrasinya sub sistem yang sedang dibangun (sistem pendapatan) yang dapat mengakibatkan resiko kesalahan (*human error*) yang tinggi dalam penyajian angka dalam laporan keuangan.

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik dasar yang telah ditentukan, salah satunya adalah ketepatan waktu. Shulthoni (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Informasi laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna apabila disampaikan tepat waktu. Sebaliknya, manfaat dari laporan keuangan akan berkurang apabila laporan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu. Menurut Dikutra dan Anna (2013), keterlambatan penyampaian laporan keuangan terjadi karena adanya beberapa pelanggaran yaitu komponen keuangan yang tidak lengkap dan terlambat menyampaikan rencana melakukan audit atas kesesuaian laporan keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini dapat menimbulkan reaksi *stakeholders* berupa keraguan mengenai laporan keuangan yang bersangkutan untuk mengambil keputusan. Selain harus tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, relevan, akurat, dan dapat dipercaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar informasi yang diterima oleh pihak yang berkepentingan tidak bias. Hanafi (2013) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap tepatwaktuan laporan keuangan. Hasil penelitian Hullah *et al.* (2012) menunjukkan secara parsial dan simultan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan propinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis perbedaan pola pengelolaan keuangan IPB sebelum dan sesudah status BLU, hubungan *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan tingkat *employee engagement* SDM keuangan di IPB.

### Perumusan Masalah

Perubahan status IPB dari BHMN menjadi BLU menyebabkan berubahnya pola pengelolaan keuangan sehingga membutuhkan personel dan sumber daya yang mampu mengikuti perubahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, pengimplikasian sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan perlu dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini bisa dicapai apabila *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi berjalan dengan baik. Peningkatan kinerja SDM keuangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan *employee engagement*.



Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor  
**SB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Oleh karena itu, masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini, antara lain berfokus pada:

1. Apakah terdapat perbedaan pola pengelolaan keuangan IPB sebelum dan sesudah diterapkannya status BLU?
2. Apakah terdapat hubungan antara *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan IPB?
3. Bagaimana tingkat *employee engagement* SDM keuangan di IPB?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbedaan pola pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya status BLU di IPB
2. Menganalisis hubungan *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di IPB
3. Menganalisis tingkat *employee engagement* SDM keuangan di IPB

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain dapat memberikan sumbangan ide, gagasan pemikiran, dan dorongan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama bagi IPB agar dapat memiliki SDM keuangan yang berkompeten dan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

### Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perbandingan pengelolaan keuangan IPB sebagai dampak perubahan status, analisis hubungan *employee engagement*, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan pemetaan SDM keuangan IPB.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### Laporan Keuangan

Menurut Harjito dan Martono (2012), laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo 2002). Nordiawan (2008) menyatakan semakin besar tuntutan akan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik, maka kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik juga semakin besar. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam





*Hak cipta dilindungi Undang-Undang*

© *Hak Cipta milik IPB, tahun 2015*

**Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**SB-IPB**  
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor